

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam sebuah negara demokratis, partisipasi politik yang aktif dari seluruh masyarakat merupakan fondasi yang sangat penting. Salah satu cara untuk memastikan partisipasi tersebut adalah melalui peningkatan literasi politik. Literasi politik adalah pemahaman masyarakat terhadap sistem politik, hak-hak mereka dalam demokrasi, serta cara-cara mereka dapat berperan aktif dalam proses politik yang berlangsung, termasuk dalam Pemilihan Umum (Pemilu) (Deti Nudiati & Elih Sudiapermana, 2021). Bernard Crick berpendapat bahwa literasi politik adalah pemahaman tentang konsep-konsep yang diadopsi dalam kehidupan sehari-hari dan bahwa bahasa merupakan faktor penting dalam memahami masalah politik, keyakinan individu yang bersaing dan bagaimana mereka mempengaruhi diri mereka sendiri dan orang lain (Nasier et al., 2018). Mendorong literasi politik di kalangan masyarakat bukan hanya tanggung jawab lembaga pendidikan formal, tetapi juga institusi negara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memainkan peran penting dalam memfasilitasi partisipasi politik yang baik. Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong literasi politik, baik menjelang Pemilu maupun dalam periode non-Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang berperan sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, memiliki tugas utama untuk mendidik masyarakat tentang mekanisme Pemilu serta pentingnya keterlibatan aktif dalam proses pemilihan. Kewajiban ini tidak terbatas pada penyelenggaraan Pemilu yang adil, melainkan juga mencakup upaya mendorong pemahaman masyarakat mengenai cara melaksanakan hak pilih mereka secara tepat dan efektif. Sebagai entitas yang bertanggung jawab atas keseluruhan proses Pemilu, KPU merancang berbagai strategi untuk memperbaiki literasi politik melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk

lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil. Dalam pelaksanaannya, KPU tidak hanya melakukan kampanye besar-besaran tentang Pemilu, tetapi juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di tingkat lokal (Sialagan & Lexianingrum, 2024).

KPU memiliki berbagai tugas dan wewenang penting dalam penyelenggaraan Pemilu, antara lain merencanakan dan menetapkan jadwal tahapan Pemilu, melakukan verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu, menetapkan daftar pemilih tetap, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, serta mengumumkan hasil Pemilu secara nasional (Kumurur, 2015). Selain itu, KPU juga berperan dalam menyosialisasikan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas Pemilu, memiliki tugas dan wewenang yang penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan integritas Pemilu. Selain melakukan pengawasan terhadap proses Pemilu, Bawaslu juga berperan dalam mendidik masyarakat untuk menjadi pengawas Pemilu yang aktif. Hal ini penting, mengingat bahwa partisipasi dalam pengawasan juga merupakan bagian dari literasi politik yang harus diperhatikan. Melalui berbagai program pendidikan politik dan pelatihan pengawasan (Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, 2025). Bawaslu memastikan bahwa masyarakat tahu bagaimana cara melaporkan kecurangan Pemilu dan ikut berperan dalam menjaga kualitas Pemilu. Bawaslu juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun kesadaran tentang pentingnya Pemilu yang bebas dari kecurangan dan penyimpangan.

Best practice yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam upaya mendorong literasi politik masyarakat terlihat dari inovasi program-program pendidikan pemilih, seperti Rumah Pintar Pemilu (RPP), kegiatan sosialisasi yang berbasis komunitas, serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam inisiatif penyadaran politik. Sebagai contoh, program RPP dikembangkan sebagai pusat edukasi Pemilu yang interaktif, yang menyampaikan informasi terkait Pemilu, demokrasi, dan hak-hak politik warga negara dengan memanfaatkan pendekatan budaya setempat. Melalui *best*

practice ini, KPU berhasil memperkuat pemahaman dan kesadaran politik masyarakat secara bertahap, tidak hanya pada saat mendekati Pemilu, tetapi juga dalam kehidupan demokratis sehari-hari (Hartono & Djuyandi, 2024).

Bawaslu juga menerapkan pendekatan *best practice* melalui penguatan pengawasan partisipatif, salah satunya dengan mendirikan program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Program ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang hukum Pemilu, teknik pengawasan, serta keterampilan advokasi, sehingga mereka dapat menjadi bagian aktif dalam menjaga integritas Pemilu. SKPP tidak hanya mendidik masyarakat untuk memahami peran pengawas, tetapi juga menciptakan jaringan pengawasan yang kuat berbasis komunitas dan kearifan lokal (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, 2025). Selain itu, kolaborasi KPU dan Bawaslu dengan tokoh adat, pemuka agama, dan lembaga pendidikan merupakan contoh nyata *best practice* yang memperluas cakupan literasi politik ke komunitas-komunitas yang sebelumnya sulit dijangkau oleh pendekatan formal.

Di dalam mendorong kecerdasan dan kritisitas kepada masyarakat, berbagai pihak, terutama KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu, pemerintah, dan peserta Pemilu, telah melakukan upaya literasi politik, terutama melalui kegiatan sosialisasi. Namun, karena batasan waktu, media, dan metodenya, upaya sosialisasi ini kurang efektif dalam mengembangkan kecerdasan dan kritisitas bagi masyarakat, sehingga selain sosialisasi kepada masyarakat dibutuhkan literasi politik untuk menambah pengetahuan masyarakat terkait hal-hal tentang politik. Literasi politik tidak hanya dilakukan oleh KPU ataupun bawaslu saja, akan tetapi semua kelompok bisa memberikan literasi politik kepada masyarakat, seperti kelompok kepentingan yaitu partai politik, organisasi masyarakat maupun lembaga sosial (Prayoga, 2013). Pemahaman masyarakat mengenai literasi politik bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, lingkungan sosial-budaya, dan lain-lain. Di Indonesia, di mana budaya paternalistik masih cukup kuat dan kaum

perempuan sering mengalami marginalisasi, faktor jenis kelamin menjadi salah satu faktor penentu dalam tingkat literasi politik masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tingkat pemahaman politik yang berbeda di Indonesia.

Best practice dalam literasi politik mengacu pada pendekatan-pendekatan yang efektif untuk mendorong pemahaman politik masyarakat serta mendorong keterlibatan aktif mereka dalam sistem politik. Literasi politik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu sangat berguna di dalam Pemilu. Sebagai wujud kedaulatan rakyat, Pemilu (termasuk Pilkada) idealnya tidak hanya ditandai dengan partisipasi massal, tetapi juga harus berlangsung dalam suasana kompetitif, transparan, adil, dan akuntabel (Bawaslu RI, 2025). Hal ini bertujuan untuk menghasilkan pemimpin politik yang kompeten dan berintegritas. Artinya, tujuan Pemilu bukan hanya mencapai tingkat partisipasi yang tinggi, tetapi juga menjaga mutu partisipasi yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan prasyarat tertentu, di antaranya adalah keterlibatan pemilih yang melek, cerdas, dan kritis secara politik, sehingga preferensi politik mereka didasarkan pada pertimbangan rasional.

Pemilih yang rasional secara sederhana dapat dijelaskan sebagai pemilih yang memiliki pengetahuan dan kesadaran elektoral yang baik, bebas dari intimidasi, tahan terhadap praktik transaksional yang tidak etis seperti politik uang, serta memahami pentingnya suara mereka dan implikasi politik dari pilihan mereka. Literasi politik pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan kemampuan masyarakat memahami prosedur Pemilu, tetapi juga mencakup kesadaran kritis terhadap nilai-nilai demokrasi, etika politik, serta implikasi dari setiap pilihan politik yang diambil. Masyarakat yang memiliki literasi politik yang baik tidak mudah terpengaruh oleh praktik-praktik politik yang bersifat manipulatif, seperti politik uang, politisasi identitas, maupun penyebaran informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, mendorong literasi politik menjadi upaya strategis untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat, sehingga

keterlibatan politik tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga rasional dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, literasi politik harus dipahami sebagai proses sosial yang berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan sosialisasi yang bersifat temporer menjelang Pemilu. Namun demikian, dalam konteks masyarakat lokal, khususnya di daerah yang masih kuat dengan nilai-nilai adat dan kekerabatan seperti Kota Solok, upaya peningkatan literasi politik tidak selalu efektif apabila hanya dilakukan melalui pendekatan formal dan institusional semata. Sosialisasi politik yang bersifat *top-down* dan teknokratis sering kali sulit dipahami secara utuh oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat akar rumput, lansia, dan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang beragam. Kondisi ini menunjukkan bahwa mendorong literasi politik membutuhkan pendekatan yang kontekstual, kultural, dan berbasis pada struktur sosial yang telah dipercaya oleh masyarakat. Dalam konteks inilah, pemangku adat memiliki posisi strategis sebagai agen pendorong literasi politik. Lembaga adat seperti LKAAM dan Bundo Kandung tidak hanya berfungsi sebagai penjaga nilai dan norma adat, tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam membentuk sikap, pandangan, dan perilaku masyarakat. Pesan-pesan politik yang disampaikan oleh pemangku adat umumnya dikaitkan dengan nilai adat, agama, dan moral kolektif, sehingga lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. Literasi politik yang dibangun melalui pendekatan adat tidak semata-mata bersifat kognitif, tetapi juga normatif dan afektif, karena menyentuh aspek rasa malu, tanggung jawab sosial, dan kehormatan kaum.

Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, tantangan utama yang mereka hadapi adalah menjangkau masyarakat yang lebih luas, terutama masyarakat yang terbilang sulit dijangkau oleh informasi resmi. Untuk itu, kolaborasi dengan tokoh-tokoh lokal, seperti pemangku adat, menjadi semakin relevan. Pemangku adat, yang memiliki otoritas dan pengaruh besar di komunitas mereka, dapat memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi politik kepada masyarakat yang lebih luas (Rachman, 2021). Mengingat kedekatan mereka dengan masyarakat,

pemangku adat dapat menjembatani komunikasi antara lembaga-lembaga negara dengan warga di daerah terpencil atau yang masih memegang teguh kearifan lokal. Pemangku adat adalah tokoh yang dihormati dalam komunitas adat yang memiliki kedudukan sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan tradisi.

Pemangku adat adalah tokoh yang dihormati dalam komunitas adat yang memiliki kedudukan sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan tradisi. Mereka memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan memberi pengaruh kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal politik. Oleh karena itu, melibatkan pemangku adat dalam upaya mendorong literasi politik bisa dianggap sebagai bentuk *best practice* yang sangat efektif. Sebagai figur yang lebih dipahami dan dipercaya oleh masyarakat lokal, pemangku adat dapat membantu memperkenalkan konsep-konsep politik yang mungkin asing bagi sebagian besar masyarakat, seperti pentingnya hak suara, sistem Pemilu, serta nilai-nilai demokrasi yang lebih luas. Salah satu bentuk *best practice* lainnya yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu adalah menggandeng pemangku adat untuk melakukan literasi politik melalui sosialisasi. Pemangku adat tidak hanya bertugas menyampaikan informasi mengenai cara-cara memilih yang benar, tetapi juga bisa memfasilitasi diskusi-diskusi politik yang relevan dengan nilai-nilai budaya setempat. Misalnya, pemangku adat dapat menjelaskan bagaimana demokrasi dan Pemilu sejalan dengan kearifan lokal yang mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Literasi politik yang disampaikan tidak hanya berbasis pada konsep-konsep demokrasi, tetapi juga terintegrasi dengan nilai-nilai tradisional yang sudah lama dijunjung tinggi oleh masyarakat. Melalui pendekatan berbasis kearifan lokal ini, masyarakat lebih mudah memahami dan menerima informasi politik yang disampaikan. Hal ini penting karena setiap masyarakat memiliki latar belakang budaya yang berbeda dan cara-cara sosialisasi yang standar atau generik tidak selalu efektif di semua lapisan masyarakat. Pemangku adat, dengan pemahaman mereka tentang nilai-nilai budaya setempat, memiliki cara yang lebih mendalam dan sesuai untuk

menyampaikan pesan-pesan tersebut. KPU dan Bawaslu dapat memberikan pelatihan kepada pemangku adat mengenai isu-isu politik kontemporer, seperti sistem Pemilu yang berlaku, serta tantangan-tantangan dalam menjaga integritas pemilu (Bawaslu RI, 2025).

Selain memberikan literasi politik kepada masyarakat, pemangku adat juga berperan dalam memperkenalkan konsep pengawasan Pemilu kepada masyarakat. Dalam masyarakat adat yang memiliki struktur sosial yang kental, partisipasi dalam pengawasan Pemilu dapat dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif untuk menjaga integritas demokrasi (Winarno et al., 2023). Pemangku adat dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana mereka dapat ikut serta dalam pengawasan Pemilu dan melaporkan adanya penyimpangan yang mungkin terjadi. Hal ini menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan Pemilu yang bersih dan transparan. Keterlibatan pemangku adat dalam literasi politik tidak terbatas hanya pada saat Pemilu berlangsung, tetapi juga dalam periode non-Pemilu. Di luar Pemilu, pemangku adat dapat memainkan peran penting dalam mendidik masyarakat mengenai peran mereka dalam proses politik yang lebih luas, termasuk dalam pembangunan daerah dan pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Pemangku adat dapat memperkenalkan masyarakat kepada sistem pemerintahan yang lebih luas dan bagaimana mereka bisa terlibat dalam pembuatan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Dengan melibatkan pemangku adat dalam literasi politik, KPU dan Bawaslu dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dalam politik. Masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam proses Pemilu, tetapi juga dalam pengawasan dan pengambilan keputusan politik yang relevan dengan kehidupan mereka. Ini menunjukkan bahwa literasi politik bukan hanya tentang memilih, tetapi juga tentang membangun kesadaran politik yang berkelanjutan. Pemangku adat, dengan posisi dan pengaruh yang mereka miliki, sangat cocok untuk menjadi fasilitator dalam menciptakan pemahaman politik yang lebih luas di tingkat masyarakat.

Tentunya, ada tantangan dalam menggandeng pemangku adat, terutama dalam menjaga agar mereka tetap berada dalam posisi netral. Dalam dunia politik yang semakin kompleks, pemangku adat harus dilatih untuk memahami pentingnya menjaga netralitas politik, terutama dalam konteks Pemilu. KPU dan Bawaslu harus memberikan pedoman yang jelas mengenai peran pemangku adat agar mereka tidak terjebak dalam praktik politik yang dapat merusak independensi mereka. Oleh karena itu, pelatihan khusus bagi pemangku adat dalam hal politik, pengawasan, dan sistem Pemilu sangat diperlukan. Penting juga untuk mencatat bahwa literasi politik yang berbasis pada kearifan lokal ini dapat memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan menggabungkan nilai-nilai tradisional yang kuat dengan sistem demokrasi modern, masyarakat dapat merasakan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang asing atau sulit dipahami. Ini juga membantu mengurangi kesenjangan antara masyarakat yang terpelajar dan masyarakat yang kurang mendapat akses terhadap pendidikan politik formal. Literasi politik yang inklusif akan menciptakan kesadaran yang lebih luas akan pentingnya keterlibatan dalam proses politik.

Melalui peran mereka dalam menjaga tradisi dan memfasilitasi dialog masyarakat, pemangku adat memiliki kesempatan yang unik untuk membentuk persepsi politik masyarakat dengan memanfaatkan pengaruh dan otoritas mereka. Pemangku adat dapat membantu mendorong kesadaran politik masyarakat tentang hak-hak politik mereka dan pentingnya partisipasi dalam proses politik. Salah satu cara di mana pemangku adat dapat mendorong literasi politik masyarakat adalah melalui penyuluhan dan pendidikan tentang sistem politik lokal, nasional, dan internasional. Pemangku adat juga dapat menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat, membantu masyarakat memahami kebijakan publik dan implikasinya bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemangku adat juga dapat memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam Pemilu dan proses politik lainnya. Mereka juga dapat membantu membangun kesadaran akan pentingnya memilih calon yang memiliki visi, integritas, dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemimpin tradisional mereka, pemangku adat dapat memperkuat fondasi demokrasi lokal dan mendorong kualitas kepemimpinan di tingkat komunitas.

Pentingnya peran pemangku adat dalam mendorong literasi politik masyarakat juga terletak pada kemampuan mereka untuk memelihara nilai-nilai lokal dan budaya yang berkontribusi pada identitas dan keberagaman kota. Dengan menjaga dan menghormati warisan budaya mereka, pemangku adat dapat memperkuat rasa identitas masyarakat dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap masa depan kolektif mereka. Penelitian tentang peran pemangku adat memiliki ciri khas sendiri ketika berinteraksi dengan masyarakat. Pemangku adat memiliki peran penting dalam literasi politik dengan cara mensosialisasikannya kepada masyarakat dan memberikan literasi politik, pemangku adat terlibat aktif dalam setiap momen yang berkaitan dengan Pemilu, pemangku adat banyak berperan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU untuk memberikan pendidikan mengenai Pemilu kepada masyarakat tidak terkecuali momen politik. Pemangku adat turut andil dalam partisipasi politik dan juga memberikan pengarahan kepada masyarakat agar terlibat dalam momen pesta demokrasi dalam Pemilu, tokoh adat juga mengajak anak muda terlibat dalam momen politik memberikan pengarahan mengenai pentingnya Pemilu dan juga suara yang ia berikan memberikan satu kontribusi untuk Indonesia.

Dalam konteks peningkatan literasi politik masyarakat di Kota Solok, jaringan sosial menjadi instrumen strategis yang menjembatani interaksi antar-aktor sosial, baik formal maupun informal. Jaringan sosial tidak hanya dipahami sebagai hubungan interpersonal, tetapi juga sebagai struktur komunikasi yang memungkinkan aliran informasi politik, nilai, dan norma berjalan secara efektif dalam masyarakat. LKAAM dan Bundo Kandung berperan sebagai *central node* dalam jaringan sosial masyarakat. Kedudukan mereka sebagai figur adat menjadikan keduanya memiliki *social capital* berupa kepercayaan, legitimasi budaya, serta kedekatan emosional dengan masyarakat. Melalui jaringan sosial tersebut, pesan-pesan mengenai pentingnya partisipasi politik,

kesadaran Pemilu, dan pemahaman hak serta kewajiban warga negara dapat diterima secara lebih persuasif dibandingkan dengan pendekatan formal birokrasi belaka.

KPU Kota Solok memanfaatkan karakteristik jaringan sosial ini melalui kemitraan kolaboratif. Kegiatan sosialisasi seperti dialog adat, panggung pidato adat, pelatihan kader perempuan adat, hingga diskusi komunitas secara tidak langsung memperkuat *bridging social capital*, yakni keterhubungan antara lembaga negara dan masyarakat adat. Pada saat yang sama, hubungan internal antara sesama tokoh adat dan anggota masyarakat memperkuat *bonding social capital*, yang memungkinkan reproduksi informasi politik dalam ruang sosial yang homogen, seperti keluarga suku, kelompok ibu-ibu adat, dan perkumpulan nagari. Efektivitas jaringan sosial terlihat dari meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi politik serta tersebar luasnya pesan politik tanpa kampanye formal. Tokoh adat berfungsi sebagai *gatekeeper* yang menentukan relevansi dan kesesuaian informasi politik dengan nilai budaya minangkabau, sehingga pesan yang diteruskan menjadi lebih dapat diterima. Dengan demikian, model jaringan sosial yang melibatkan KPU Kota Solok, LKAAM, dan Bundo Kandung dapat dikategorikan sebagai *best practice* dalam strategi peningkatan literasi politik berbasis kearifan lokal.

Penelitian mengenai peran pemangku adat dalam mendorong literasi politik masyarakat di Kota Solok sudah ada dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dalam hal ini peneliti berharap dapat memberikan inovasi baru dalam penelitian ini. Dari beberapa literatur yang peneliti baca, terdapat lima penelitian yang memiliki fokus tentang literasi politik, adapun penelitiannya yaitu: Penelitian dari Agus Sutisna yang berjudul “Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Warga di Desa Cibodas” (Sutisna, 2017). Penelitian ini menyoroti kontribusi tokoh masyarakat dalam membangun kesadaran politik warga, namun tidak secara spesifik menyoroti peran kelembagaan adat. Tokoh yang dimaksud masih bersifat umum dan tidak berfokus pada struktur adat formal seperti LKAAM atau Bundo Kandung. Dengan demikian, nilai-nilai kultural dan kearifan lokal belum tergambar secara utuh dalam proses

literasi politik yang dibahas. Neneg dalam penelitiannya yang berjudul “Literasi Politik Pemilih Pemula di Kalangan Pelajar SMA” mengkaji tingkat pemahaman politik di kalangan generasi muda (Neneg, 2022). Penelitian ini memiliki kelebihan dalam fokusnya pada kelompok strategis, yaitu pemilih pemula, namun belum menyentuh peran institusi sosial-budaya lokal dalam pembentukan kesadaran politik mereka. Artinya, aspek struktural seperti pengaruh adat dan lingkungan sosial belum menjadi bagian dari analisis.

Aldo Depriasnyah yang berjudul “Peran Tokoh Adat dalam Pendidikan Politik Masyarakat (Fenomena pada Desa Gunung Sugih Baru)” (Depriasnyah, 2021). Penelitian ini sudah mulai mengangkat tema pendidikan politik berbasis adat, tetapi masih terbatas pada konteks desa di luar Minangkabau. Selain itu, tokoh adat yang dimaksud lebih bersifat individual daripada institusional. Padahal, di Minangkabau, adat memiliki struktur kelembagaan formal yang kuat dan memainkan peran aktif dalam kehidupan masyarakat. Hal inilah yang menjadi celah sekaligus peluang bagi penelitian ini untuk mengangkat peran LKAAM dan Bundo Kanduang secara lebih spesifik dan kontekstual di Kota Solok. Mhd Fajri dalam penelitiannya yang berjudul “Adat dan Pilkada: Analisis Peran Pemangku Adat dalam Demokrasi Lokal” secara langsung mengkaji hubungan antara adat dan proses politik lokal (Fajri, 2022). Penelitian ini merupakan salah satu yang paling dekat secara tematik dengan penelitian ini. Kelebihannya adalah mampu menempatkan pemangku adat sebagai aktor demokrasi lokal. Namun, kajiannya belum secara spesifik menyoroti peran pemangku adat dalam konteks literasi politik masyarakat secara terukur dan terstruktur, serta tidak difokuskan pada daerah tertentu seperti Kota Solok yang memiliki sistem adat aktif melalui lembaga seperti LKAAM dan Bundo Kanduang. Penelitian ini masih bersifat umum dalam melihat kontribusi adat terhadap proses demokrasi.

Aulia Anjani berjudul “*Reinforcement Political Education for the Young Generation through Podcast-Based Political Literacy to Increase Political Participation in Elections in the Digital Era*” menyajikan pendekatan literasi politik

yang inovatif berbasis media digital (Anjani & Aulia, 2021). Penelitian ini menawarkan solusi yang sesuai dengan zaman digital, khususnya untuk menjangkau generasi muda. Namun, pendekatan ini cenderung berorientasi pada teknologi dan kurang mempertimbangkan peran sosial-budaya tradisional yang tetap relevan dan efektif di daerah yang masih memegang nilai adat, seperti Kota Solok. Kelemahannya adalah tidak mempertimbangkan bahwa literasi politik yang disampaikan melalui figur adat yang dihormati bisa memberikan efek yang lebih mendalam dalam membentuk kesadaran politik secara kultural. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini membahas literasi politik dari sudut pandang pendidikan formal, media sosial, dan peran tokoh adat dalam politik, baik dalam konteks Pemilu maupun dalam pembentukan kesadaran politik masyarakat. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti literasi politik dalam konteks pendidikan formal, media sosial, atau peran tokoh adat dalam politik elektoral, dengan pendekatan yang lebih bersifat umum dan terpisah dari kearifan lokal. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dilihat dari fenomena, objek dan lokasi penelitiannya.

Dari beberapa penelitian di atas bahwasanya untuk mendorong literasi politik berbagai strategi dapat dilakukan, seperti peran lembaga, media sosial maupun peran tokoh adat. Melalui kajian tersebut, dapat dipahami bahwa isu literasi politik telah banyak dibahas, namun masih terbatas pada pendekatan tunggal dan belum menjelajahi model kolaboratif berbasis nilai-nilai lokal. Di sinilah letak *state of the art* dari penelitian ini, yakni menyatukan pendekatan kelembagaan, sosial, dan budaya melalui sinergi antara pemangku adat (LKAAM dan Bundo Kandung) dengan KPU Kota Solok dalam upaya mendorong literasi politik masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menjadikan pemangku adat sebagai simbol budaya, tetapi mengangkatnya sebagai aktor aktif dan strategis dalam pendidikan politik lokal. LKAAM dan Bundo Kandung dalam penelitian ini diposisikan sebagai figur yang memiliki legitimasi sosial, modal

kepercayaan masyarakat, serta mampu menjangkau lapisan masyarakat dengan cara-cara yang komunikatif dan kontekstual.

Kebaruan dari penelitian ini yaitu menyoroti sinergi antara pemangku adat dan KPU sebagai bentuk kemitraan strategis dalam penyelenggaraan literasi politik yang berbasis nilai lokal. Penelitian ini menemukan kebaruan bahwa pemangku adat di Kota Solok selalu diundang oleh KPU ketika mengadakan rapat, serta secara konsisten dilibatkan dalam berbagai acara maupun kegiatan di luar agenda formal KPU. Hal ini menunjukkan adanya pola kolaborasi yang unik antara lembaga penyelenggara Pemilu dengan pemangku adat sebagai representasi kearifan lokal dalam mendukung peningkatan literasi politik masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya minangkabau dijadikan sebagai medium komunikasi politik yang efektif karena berakar pada sistem sosial yang dihormati masyarakat. Penelitian ini juga memberikan perhatian khusus pada peran Bundo Kandung dalam memperkuat pemahaman politik perempuan, melalui ruang-ruang informal seperti dalam perkumpulan kajian, arisan, dan kegiatan sosial keagamaan yang tidak terjangkau oleh pendekatan formal negara. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tokoh adat menjadi modal sosial penting dalam mendukung keberhasilan literasi politik yang berkelanjutan serta jaringan sosial yang dimiliki oleh pemangku adat, LKAAM dan Bundo Kandung.

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu aktor yang ikut melakukan literasi politik kepada masyarakat yaitu pemangku adat di Kota Solok, seperti Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Bundo Kandung. Literasi politik sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat dalam partisipasi politik dan pemangku adat adalah orang yang cukup berpengaruh di dalam lingkaran masyarakat Kota Solok. Pemangku adat, sebagai pemimpin tradisional di Kota Solok, memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk dan mengarahkan pandangan politik masyarakat setempat. Tradisi dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh pemangku adat sering kali mencerminkan nilai-

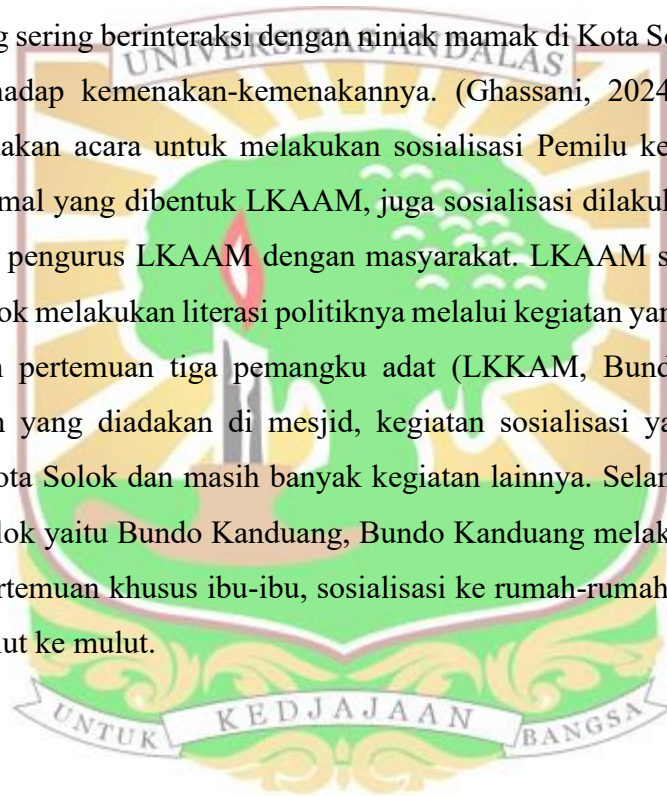
nilai demokrasi lokal dan penghargaan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses politik. Secara sosial, masyarakat Kota Solok masih kental dengan adat dan budaya minangkabau. Masyarakat Kota Solok sering juga disebut sebagai anak *nagari* karena adat-adat yang ada di Kota Solok dari dahulu sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat di sana.

LKAAM dan Bundo Kanduang adalah dua institusi yang sangat penting dalam budaya minangkabau. Keduanya sering dijadikan contoh dalam konteks *best practice* dalam literasi politik dan pengelolaan sosial budaya di masyarakat minangkabau, karena peran mereka yang sangat besar dalam menjaga tradisi, adat istiadat, serta partisipasi politik masyarakat. LKAAM adalah lembaga adat yang berfungsi sebagai wadah untuk menjaga dan melestarikan adat minangkabau. Dalam konteks *best practice*, LKAAM memainkan peran penting dalam: (Andhika & Putra, 2018) (1). Penyuluhan dan sosialisasi, LKAAM menjadi saluran utama dalam mengedukasi masyarakat tentang adat dan nilai-nilai budaya minangkabau, serta membantu mengaitkan nilai-nilai tradisional dengan praktik-praktik sosial dan politik modern. (2). Pemecahan masalah sosial, LKAAM berperan sebagai lembaga yang mengarahkan penyelesaian masalah sosial berdasarkan adat, menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. (3). Partisipasi politik, LKAAM juga bisa berperan dalam proses-proses politik lokal, karena adat Minangkabau mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat.

Peran pemangku adat dalam literasi politik sangat penting mengingat pemangku adat merupakan tokoh yang dekat dengan masyarakat dan disegani oleh masyarakat, serta juga pemangku adat cukup memahami bagaimana cara komunikasi masyarakat di Kota Solok, selain itu pemangku adat memiliki wewenang mengenai hal-hal yang bersifat sosial di Kota Solok. Pemangku adat di Kota Solok yang sering melakukan sosialisasi dan literasi politik kepada masyarakat yaitu LKAAM dan Bundo Kanduang. Memberikan literasi politik kepada masyarakat oleh LKAAM dan Bundo Kanduang menjadi cara untuk mendorong literasi politik masyarakat karena Kota

Solok masih menjaga kearifan lokalnya dan tokoh-tokoh adat yang berada di Kota Solok menjadi pengaruh penting atau mempunyai potensi yang tinggi.

Kegiatan yang dilakukan oleh pemangku adat di Kota Solok untuk mendorong literasi politik masyarakat yaitu dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan yang diselipkan materi-materi tentang politik, karena pemangku adat di Kota Solok sudah mempunyai massa, sehingga tidak terlalu susah mengumpulkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan. LKAAM lebih fokus kepada masyarakat-masyarakat yang sering berinteraksi dengan niniak mamak di Kota Solok dan LKAAM juga fokus terhadap kemenangan-kemenakannya. (Ghassani, 2024). LKAAM juga banyak mengadakan acara untuk melakukan sosialisasi Pemilu kepada masyarakat. Selain acara formal yang dibentuk LKAAM, juga sosialisasi dilakukan melalui mulut ke mulut antara pengurus LKAAM dengan masyarakat. LKAAM sebagai pemangku adat di Kota Solok melakukan literasi politiknya melalui kegiatan yang mereka adakan, seperti kegiatan pertemuan tiga pemangku adat (LKKAM, Bundo Kandung dan KAN), kegiatan yang diadakan di mesjid, kegiatan sosialisasi yang bekerja sama dengan KPU Kota Solok dan masih banyak kegiatan lainnya. Selanjutnya pemangku adat di Kota Solok yaitu Bundo Kandung, Bundo Kandung melakukan dengan cara mengadakan pertemuan khusus ibu-ibu, sosialisasi ke rumah-rumah warga, pengajian dan melalui mulut ke mulut.



Tabel 1.1

**Kegiatan-Kegiatan Yang Dilakukan Oleh LKAAM, Bundo Kandung beserta
KPU Kota Solok Tahun 2018-2024**

No	Nama Kegiatan	Hari/Tanggal	Tempat Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	Kegiatan Gerakan Melindungi Hak Pilih dan Sosialisasi Tahapan Kampanye	Rabu/17-10-2018	Gedung Kubung 13	156 Peserta
2.	Kegiatan Tentang Pemilu Serentak Oleh KPU Kota Solok, LKAAM dan Bundo Kandung	Sabtu/16-2-2019	Mesjid Sikarah Lubuk	200 Peserta
3.	Kegiatan Pemilu Serentak 2019	Sabtu/9-3-2019	Mesjid Sikarah Lubuk	197 Peserta
4.	Penyuluhan Kepada Masyarakat dalam Menghadapi Pilpres dan Pileg di Kota Solok	Kamis/21-3-2019	Aula SMPN 5 Kota Solok	140 Peserta
5.	Kegiatan Sosialisasi Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2019	Kamis/11-4-2019	Pelantaran Parkir Lapangan Merdeka	15 Peserta
6.	Kegiatan Pengawasan Anti Politik Uang dalam Pemilu Serta <i>checking</i> Persiapan Pelaksanaan Pemilu	Jumat/12-4-2019	Halaman Kota Balai	250 Peserta
7.	Sosialisasi dalam Mengsukseskan Pemilu 2019	Minggu/14-4-2019	Lapangan Kota Solok Polres	239 Peserta
8.	Apa itu demokrasi dan Pemilu	Jumat//14-6-2019	Mesjid Raya Lubuk Sikarah	67 Peserta
9.	Politik Uang dan Menyukseskan Pemilu 2024	Minggu/22-5-2022	Mesjid Sikarah Lubuk	25 Peserta
10.	Siaga Penanganan Satu Tahun Menuju Pemilu	Selasa/ 14-02-2023	Hotel Tofina	-
11.	Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian dan Penyusunan Daftar Pemilu Di Lokasi	Sabtu/ 25-02-2023	D'Relazion	-
12.	Kegiatan gabungan KPU, LKAAM, Bundo Kandung dan KAN membahas materi Pemilu dan demokrasi kepada masyarakat	Selasa/ 11-04-2023	Mesjid Raya Lubuk Sikarah	61 Peserta
13.	Rapat Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPS	Rabu/ 5 -04-2023	KPU Kota Solok	-

14.	Sosialisasi Permasalahan Daerah Pemilihan dan Kursi	Fasilitas Pasca Penetapan Alokasi	Kamis/15-06-2023	D'Relazion	-
15.	FGD Tahapan Pemilu		Jumat/23-06-2023	Aula Ceredek Hotel	
16.	Sosialisasi memberikan pemilu	Pemilu 2024, literasi tentang	Jumat/17-11-2023	Mesjid Raya Lubuk Sikarah	Peserta yang hadir yaitu pesert yang sholat jum'at di masjid tersebut
17.	Sosialisasi Tahapan Pemilu	Kampanye	Sabtu/20-01-2024	Mesjid Raya Lubuk Sikarah	31 Peserta
18.	Sosialisasi Tahapan Pemilu		Minggu/19-11-2024	D'Relazion Café	47 Peserta
19.	Sosialisasi kepada Disabilitas	Tahapan Pemilu Komunitas Pemilih	Senin/20-11-2024	Solok Premier Hotel Syariah	43 Peserta
20.	Sosialisasi Serentak	Tahapan Pemilu	Sabtu/25-11-2024	Caradek Hotel Kota Solok	56 Peserta

Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti, Tahun 2025

Berdasarkan data kegiatan literasi politik yang dilakukan di Kota Solok sejak 2018 hingga 2024, terlihat bahwa kolaborasi antara KPU Kota Solok dan lembaga adat seperti LKAAM serta Bundo Kandung memainkan peran signifikan dalam upaya peningkatan kesadaran politik masyarakat. Dalam kegiatan-kegiatan tertentu, KPU bertindak sebagai fasilitator atau penyelenggara formal, sementara materi dan pendekatan edukatif secara langsung disampaikan oleh pemangku adat. Model ini menunjukkan adanya pembagian peran yang efektif dan saling melengkapi antara lembaga negara dan lembaga adat.

Pada kegiatan seperti Gerakan Melindungi Hak Pilih dan Sosialisasi Tahapan Kampanye (17 Oktober 2018), Sosialisasi Pemilu Serentak (16 Februari 2019), hingga Simulasi Pemungutan Suara (11 April 2019), KPU menjadi pihak penyelenggara teknis, namun yang memberikan materi dan pendekatan langsung kepada masyarakat adalah LKAAM. Hal yang sama juga terjadi pada kegiatan Penyuluhan Pemilu di Aula SMPN 5 Kota Solok (21 Maret 2019), serta pada kegiatan gabungan di Masjid Raya

Lubuk Sikarah pada 11 April 2023 dan sosialisasi pada awal 2024. Dalam konteks ini, LKAAM tidak hanya tampil sebagai simbol adat, melainkan sebagai penyampai aktif nilai-nilai demokrasi melalui pendekatan budaya. Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran tokoh adat dipercaya mampu menjembatani informasi teknis pemilu dengan pemahaman masyarakat yang berbasis pada nilai lokal.

Terdapat pula kegiatan yang berangkat dari inisiatif murni LKAAM dan Bundo Kandung tanpa keterlibatan langsung KPU. Misalnya, kegiatan Sosialisasi Menyukkseskan Pemilu 2019 di Lapangan Polres (14 April 2019), Dialog “Apa Itu Demokrasi dan Pemilu” di Masjid Raya Lubuk Sikarah (14 Juni 2019), Penyuluhan tentang Politik Uang dan Pemilu 2024 (22 Mei 2022), serta Sosialisasi Pemilu 2024 melalui khotbah Jumat (17 November 2023). Kegiatan-kegiatan ini memperlihatkan bahwa LKAAM dan Bundo Kandung memiliki kesadaran politik kolektif yang tinggi serta kapasitas untuk menyampaikan literasi politik secara mandiri. Mereka memanfaatkan ruang-ruang sosial dan religius sebagai medium untuk menyampaikan pesan politik yang beretika dan mengedepankan nilai-nilai demokrasi berbasis adat.

Penting dicatat bahwa pada kegiatan-kegiatan yang bersifat kultural dan nonformal ini, kepercayaan masyarakat terhadap tokoh adat menjadi modal sosial yang sangat kuat. Materi-materi yang disampaikan tidak hanya informatif, tetapi juga kontekstual dengan situasi sosial masyarakat Kota Solok yang masih sangat menghormati nilai-nilai adat. Pendekatan seperti ini dinilai lebih efektif dibandingkan penyuluhan formal, karena pesan-pesan politik disampaikan dalam bahasa dan simbol yang akrab di telinga masyarakat. Kegiatan lainnya pada 2024 seperti sosialisasi di D'Relazion Café (19 November), kepada komunitas disabilitas di Hotel Premier Syariah (20 November), serta kegiatan di Caradek Hotel (25 November), juga merupakan contoh sinergi antara KPU sebagai fasilitator dan LKAAM sebagai pemberi materi. Ketiganya menunjukkan adanya segmen literasi politik yang lebih inklusif, menjangkau kalangan muda, komunitas rentan, dan peserta nonformal. Hal ini

mempertegas bahwa pendekatan literasi politik di Kota Solok tidak dilakukan secara tunggal, melainkan melalui kombinasi formal-informal dan kelembagaan-kultural.

Berdasarkan penjelasan kegiatan di atas, terlihat bahwa setiap kali KPU Kota Solok menyelenggarakan acara, pemangku adat selalu diundang dan dilibatkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pemangku adat dapat berperan sebagai perantara dalam menyosialisasikan literasi politik maupun kepemiluan kepada masyarakat, terutama kepada kemenakan-kemenakan mereka, sehingga pesan demokrasi dapat sampai secara efektif ke lapisan masyarakat akar rumput. Adapun seperti yang sudah di katakan di atas ketika KPU mengadakan acara pemangku adat menjadi narasumber atau pemateri dan adapun kegiatan yang diinisiasi oleh pemangku adat sendiri seperti yang sudah dijelaskan di atas. Kegiatan yang diadakan oleh KPU dan narasumbernya pemangku adat dana yang dikeluarkan memakai dana KPU Kota Solok, tetapi KPU Kota Solok tidak selalu memberikan dana ke LKAAM dan Bundo Kandung ketika mengadakan sosialisasi, karena LKAAM dan Bundo Kandung melakukan kegiatan tersebut bekerja secara sukarela dan tidak mengikat. Beberapa dana yang dilakukan dalam melaksanakan sosialisasi berasal dari dana LKAAM dan Bundo Kandung, yaitu berasal dari pemerintahan daerah dan dana tersebut bukan hanya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, tetapi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LKAAM memakai dana tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Rusli pada saat melakukan wawancara (Wawancara dengan Muhammad Rusli, Ketua LKAAM dan niniak mamak, 13 November 2023):

“Kita kan ada melaksanakan kegiatan sendiri LKAAM maupun Bundo Kandung, tidak lupa kita tetap mengingatkan dan memberikan materi politik, , sebelumnya kita panggil KPU untuk memberikan sosialisasi kepada lembaga adat, supaya waktu kita memberikan materi ke masyarakat kita sudah tau apa saja isinya, mumpung kita sudah punya masa, kenapa tidak dibawa mereka, kita juga siapkan *snacknya*, ada makannya, tetapi dananya dari dana pemerintah”.

Peserta yang hadir yaitu massa yang dibawa oleh LKAAM dan Bundo Kandung, jadi KPU hanya sekedar menyiapkan dana saja. Namun kegiatan-kegiatan

yang diselenggarakan di luar program resmi KPU, seperti yang kegiatan-kegiatan LKAAM lainnya, tetap memuat materi mengenai Pemilu dan politik. Hal yang sama juga dilakukan oleh Bundo Kandung dalam berbagai kegiatannya. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Rusli selaku ketua LKAAM (Wawancara dengan Muhammad Rusli, Ketua LKAAM, 13 November 2023):

“Saya melakukan kegiatan yang diselenggarakan oleh LKAAM seperti acara adat dan lainnya, ya saya di sana tetap memberikan materi apa itu politik apa itu pemilu dengan cara berikan contoh ya bahwa pemimpin adat itu kan dipilih melalui musyawarah, jadi materi yang disampaikan dengan bahasa sehari-hari dengan diberikan contoh. Ibaratkan kita berbicara dengan anak kita”

Sosok ketua LKAAM yaitu Rusli dihormati dikalangan masyarakat dan mampu melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan mudah. LKAAM dianggap memiliki basis massa yang loyal dan rutin berinteraksi dengan masyarakat setiap harinya. Kegiatan sosialisasi untuk mendorong literasi politik yang dilakukan oleh LKAAM, LKAAM melakukan dengan cara mengadakan kegiatan sosialisasi dan juga terkadang diselipkan dengan kegiatan lainnya, seperti kegiatan sosialisasi mengenai Pemilu dan kegiatan lainnya untuk memberikan literasi politik kepada masyarakat. LKAAM juga mengundang KPU, Bundo Kandung untuk menghadiri kegiatan tersebut. LKAAM Kota Solok juga mengadakan sosialisasi untuk memberikan materi-materi terkait Pemilu melalui penggabungan acara-acara adat, melalui khutbah Jum'at hingga menjadi inisiator sosialisasi gabungan bersama KPU Kota Solok di lapangan merdeka Kota Solok. LKAAM juga mengadakan semacam kegiatan-kegiatan seperti ceramah maupun pertemuan pemangku adat untuk memberikan literasi politik tersebut kepada masyarakat. LKAAM juga dikatakan sebagai perpanjangan tangan pemerintah di Kota Solok, sehingga LKAAM yang dijadikan KPU untuk mensosialisasikan Pemilu dan memberikan literasi politik, bertujuan agar sosialisasi tersebut netral dan tidak berpihak kepada siapapun.

LKAAM dan Bundo Kandung menggunakan jaringan sosial sebagai medium strategis untuk memberikan literasi politik kepada masyarakat dengan memanfaatkan

kedekatan budaya dan hubungan sosial yang telah terbentuk kuat dalam struktur adat minangkabau. Melalui posisi mereka sebagai tokoh yang dihormati dan dipercaya, penyampaian informasi politik tidak dilakukan secara formalistik, melainkan terintegrasi dengan aktivitas sosial dan adat yang rutin dihadiri masyarakat, seperti pertemuan nagari, kegiatan perempuan adat, forum penghulu, serta acara sosial keagamaan. Pemanfaatan jaringan sosial ini memungkinkan pesan-pesan mengenai hak dan kewajiban politik warga, pentingnya partisipasi Pemilu, dan pemahaman sistem demokrasi disampaikan dalam bahasa yang sesuai dengan nilai budaya serta dalam ruang sosial yang familiar bagi masyarakat. Dengan demikian, literasi politik tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga persuasif, karena dikomunikasikan melalui figur adat yang memiliki otoritas moral dan kultural. Pola ini menunjukkan bahwa jaringan sosial menjadi instrumen yang mampu menjembatani materi politik modern dengan kearifan lokal sehingga membuka peluang terciptanya peningkatan kesadaran politik masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan.

Dalam kegiatannya LKAAM memberikan literasi politik terkait Pemilu tersebut menggunakan bahasa sehari-hari. Di dalam pertemuan lembaga adatpun LKAAM juga membuka ruang diskusi tentang Pemilu dari materi yang disampaikan kepada masyarakat. Selain LKAAM, pemangku adat di Kota Solok yang memberikan literasi politik yaitu Bundo Kandung. Bundo kandung juga melakukan perannya dengan cara tersendiri juga. Bundo Kandung memanfaatkan para bundo-bundo disetiap kelurahan untuk melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu di Kota Solok. Bundo-bundo aktif turun ke lapangan dan mengunjungi rumah warga satu persatu untuk mensosialisasikan Pemilu. Para bundo juga mengkampanyekan politik damai kepada para masyarakat untuk tidak ikut campur dalam konflik politik. Cara yang bundo lakukan lebih mengayomi dan memperkuat persaudaraan. Para bundo dihargai masyarakat serta semangat dari para bundo yang hampir setiap hari mendatangi rumah masyarakat satu per satu. Dapat dilihat dari Bundo Kandung dalam melakukan kegiatan yang berbeda-beda, yang pertama Bundo Kandung melakukan pertemuan

dengan lembaga adat, dan mengundang KPU Kota Solok menjadi narasumber, selanjutnya anggota-anggota Bundo Kandung diberi pelatihan dan pembinaan oleh KPU Kota Solok untuk bekal turun ke lapangan. Bundo Kandung mensosialisasikannya untuk memberikan literasi politik dan Pemilu dari mulut ke mulut menggunakan bahasa sehari-hari.

Penyampaian materi politik oleh pemangku adat sangat erat kaitannya dengan jaringan sosial yang mereka miliki. Dalam konteks ini, jaringan sosial merujuk pada hubungan-hubungan sosial yang terbangun antara tokoh adat dan berbagai elemen masyarakat mulai dari tokoh agama, kepala keluarga, pemuda, perempuan, hingga komunitas rentan seperti penyandang disabilitas. Jaringan ini memungkinkan pesan politik yang disampaikan tidak berhenti di ruang acara semata, tetapi mengalir secara horizontal ke berbagai kelompok sosial. Misalnya, Bundo Kandung memanfaatkan relasi sosialnya melalui majelis taklim, organisasi perempuan adat, dan kegiatan keluarga untuk menyampaikan nilai-nilai demokrasi secara kultural dan tidak menggurui. Hal ini memungkinkan mereka menjangkau kalangan perempuan dan ibu rumah tangga yang sering kali tidak tersentuh oleh literasi politik formal. Demikian pula LKAAM memanfaatkan jaringan surau, pengurus masjid, dan struktur adat di tingkat kelurahan dan nagari untuk memperluas cakupan literasi politik yang mereka sampaikan. Jaringan sosial ini memberikan keunggulan tersendiri karena sifatnya yang lebih personal, penuh kepercayaan, dan berbasis nilai-nilai lokal. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih menerima informasi politik dari tokoh adat yang mereka hormati, dibandingkan dari institusi formal yang mereka anggap birokratis atau terlalu teknokratis. Oleh sebab itu, jaringan sosial menjadi alat yang sangat penting dalam menyebarkan pesan politik secara inklusif dan menyeluruh.

Literasi politik menjadi salah satu yang sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat dalam partisipasi politik yang bijaksana. Ini mengindikasikan keyakinan akan hubungan positif antara peningkatan literasi politik dan partisipasi politik yang lebih baik. Pemangku adat di Kota Solok, yang terdiri dari LKAAM dan

Bundo Kandung, dapat dikategorikan sebagai *best practice* dalam mendorong literasi politik masyarakat, khususnya terkait dengan Pemilu dan partisipasi politik. LKAAM dan Bundo Kandung, sebagai lembaga adat yang memiliki kedudukan penting di tengah masyarakat minangkabau, memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendukung tujuan ini. Selama masa Pemilu, mereka berperan aktif dalam memberikan informasi terkait Pemilu, tidak hanya untuk mendorong partisipasi pemilih, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemahaman politik yang lebih luas. Pada Tahun 2019 LKAAM, Bundo Kandung dan KAN mendapatkan penghargaan atas partisipasinya dalam memberikan sosialisasi Pemilu kepada masyarakat.



Gambar 1.13

Piagam Penghargaan dari KPU kepada LKAAM, KAN dan Bundo Kandung

Sumber : Data Primer, Tahun 2023

Lebih jauh lagi, LKAAM dan Bundo Kandung menunjukkan keberlanjutan dalam peran mereka setelah masa Pemilu berakhir. KPU mengharapkan adanya upaya yang berkesinambungan dalam literasi politik dan ini telah diwujudkan oleh pemangku adat di Kota Solok. Meskipun masa Pemilu telah berlalu, mereka tetap melanjutkan literasi politik melalui kegiatan adat yang sering melibatkan masyarakat, seperti pertemuan adat dan rapat *nagari*. Dalam forum-forum ini, LKAAM dan Bundo Kandung secara tidak langsung juga menyelipkan materi politik, memfasilitasi

dialog politik yang lebih santai namun tetap mendidik masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam kehidupan politik, baik dalam Pemilu maupun dalam kehidupan sehari-hari (Ghassani, 2024, p. 126).

LKAAM dan Bundo Kandung tidak hanya menjalankan fungsi mereka sebagai pemangku adat, tetapi juga berkontribusi pada sosialisasi dengan memberikan literasi politik kepada masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks ini, LKAAM dan Bundo Kandung jelas dapat dianggap sebagai bagian dari *best practice*, karena mereka tidak hanya mendukung pelaksanaan literasi politik pada masa Pemilu, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk kesadaran politik yang lebih matang di masyarakat Kota Solok. Partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 di kota tersebut mencapai 86% atau sekitar 40.779 pemilih dari 47.418 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Partisipasi pemilih di Kota Solok meningkat hingga 8,5% dari pemilihan legislatif pada 2014 yang hanya 77,5% (Sumbangpro.go.id, 2025). Jumlah pemilih Perempuan juga meningkat dari pada pemilu 2014 yaitu 23.180 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 23.861. Pada pemilu 2024 partisipasi pemilih yaitu 55.832 orang dan jumlah pemilih Perempuan yaitu 23.832 orang (Horizone.co.id, 2025).

LKAAM dan Bundo Kandung digunakan sebagai *best practice* karena keduanya mencerminkan praktik terbaik dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas, serta mendukung partisipasi aktif dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik. Mereka adalah contoh bagaimana sebuah masyarakat dapat menjalankan literasi politik dan sosial dengan cara yang berbasis pada adat istiadat yang sudah terbukti efektif dalam menciptakan kohesi sosial, partisipasi, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan penelitian di atas, peneliti berasumsi bahwa pemangku adat memiliki peran penting dalam memberikan literasi politik di Kota Solok karena kedekatannya dengan masyarakat, pengaruh yang dimilikinya, serta pemahaman yang cukup baik tentang kondisi sosial di wilayah tersebut. LKAAM dan Bundo Kandung memiliki peran yang signifikan dalam memberikan literasi politik kepada masyarakat, terutama melalui kegiatan sosialisasi, pertemuan, pelatihan, dan penggunaan bahasa

sehari-hari untuk menyampaikan informasi tentang politik dan Pemilu dengan jaringan sosial yang dimilikinya. Beberapa alasan yang mendasari asumsi ini antara lain yaitu peran pemangku adat yang sentral, artinya di Kota Solok, pemangku adat sering kali memegang posisi yang dihormati dan memiliki otoritas moral dalam masyarakat. Bukan hanya memiliki peran sebagai tokoh adat saja, tetapi ikut andil dalam ranah politik. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjadi agen perubahan dan pendidikan, termasuk dalam memberikan literasi politik dan mempunyai jaringan sosial yang luas, artinya pemangku adat biasanya memiliki jaringan sosial yang luas dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Jaringan ini bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi dan literasi politik. Kemudian pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran pemangku adat sebagai *best practice* dalam mendorong literasi politik di Kota Solok?
2. Bagaimana pemangku adat di Kota Solok menggunakan jaringan sosial mereka untuk menyampaikan literasi politik kepada berbagai lapisan masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan penelitian yang peneliti kemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan peran pemangku adat sebagai *best practice* dalam mendorong literasi politik di Kota Solok.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbang pemikiran dan perkembangan pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu politik, terutama berkaitan dengan peran pemangku adat dalam mendorong literasi politik di Kota Solok, khususnya bagi Mahasiswa Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas dan kepada para pembaca yang membaca penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan untuk menjadi referensi tambahan terkait peran pemangku adat dalam mendorong literasi politik di Kota Solok, terkhusus dalam menganalisis peran pemangku adat dalam mendorong literasi politik. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai langkah awal bagi peneliti sekaligus mendorong peneliti lainnya untuk dapat lebih mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.

